

# **HUKUM KELUARGA**

## **DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN**

### **Kontributor :**

**Mohammad Rusfi**

**Sabdo**

**Nasruddin**

**Fristia Berdian Tamza**

**A. Khumedi Ja'far**

**Susiadi A.S**

**Abdul Qodir Zaelani**

**Musnad Rozin**

**Syamson Fajar**

**Maimun**

**Ahmad Rajafi**

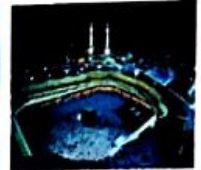
**Khoirul Abror**

**Dewani Romli**

**Syamsul**

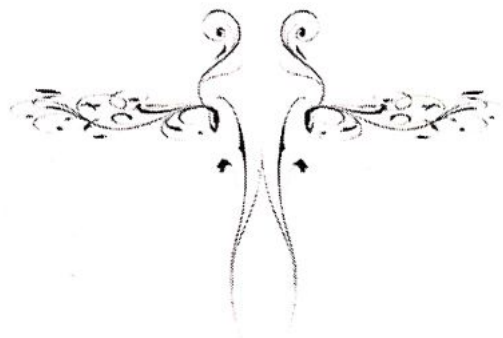
**Pengantar Editor :**

**Abdul Qodir Zaelani**



# **HUKUM KELUARGA**

## **DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN**



Anugrah Utama Raharja (AURA)  
Printing & Publishing



# **HUKUM KELUARGA**

## **DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN**

Mohammad Rusfi

Sabdo

Nasruddin

Frestia B. Tamza

A. Khumedi Ja'far

Susiadi A.S

Abdul Qodir Zaelani

Musnad Rozin

Syamson Fajar

Maimun

Ahmad Rajafi

Khoirul Abror

Dewani Romli

Syamsul

Pengantar Editor: Abdul Qodir Zaelani



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

# **HUKUM KELUARGA**

## **DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN**

Editor :  
Abdul Qodir Zaelani

Desain Cover :  
Busyral Hanif

Layout  
Busyral Hanif

Diterbitkan oleh :  
Anugrah Utama Raharja (AURA)  
Printing & Publishing  
**ANGGOTA IKAPI**

Alamat:  
Jl. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila, Gedungmeneng Rajabasa  
Bandar Lampung-Telp: 0721 758 3211 HP. 081281430268  
*website: aura-publishing.com*

Cetakan Pertama April 2013

xii – 243 Hal.: 15.5 cm x 23 cm  
ISBN : 978-602-9326-56-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## PENGANTAR EDITOR



Berbicara hukum keluarga terutama di dunia muslim modern, akan selalu menarik untuk diperbincangkan sebagai bahan kajian, referensi dan pertimbangan dalam rangka mewujudkan hukum yang lebih progressif dan komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar serta selalu berkembang di masyarakat seiring perkembangan zaman. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mempunyai kekuatan moral masyarakat. Dengan demikian, tidak mengherankan jika potensi menerapkan hukum keluarga yang *adaptable* dan *applicable* terhadap budaya dan adat sebuah negara adalah sebuah keniscayaan.

Bila diteliti dengan seksama akan ditemukan polarisasi (kategorisasi) penerapan hukum keluarga dalam sebuah negara. Setidaknya bisa dikelompokkan menjadi tiga: *Pertama*, Negara memberlakukan hukum keluarga secara tradisional. Negara masih memberlakukan *al-fiqh ala al-madzahib al-arba'ah* dan tidak dikodifikasi dalam bentuk undang-undangan. Artinya, pemberlakuan hukum hanya *the facto* saja tanpa *the jure*. Negara-negara yang tergolong kelompok pertama ini adalah Negara Saudi Arabia yang menganut madzhab Hambali. Di Yaman, hukum Islam didasarkan kepada Madzhab Zaidi. Namun, penduduk Yaman Selatan menganut Madzhab Syafi'i dan Hanafi. Hukum-hukum ini tidak dikodifikasi dan dilegislati. Sementara di Bahrain, Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Syi'i diterapkan secara tradisional, tanpa dikodifikasi dan dilegislati. Begitu juga di Negara Qatar.

*Kedua*, Negara-negara sekuler di mana hukum keluarga telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk mereka yang telah meninggalkan hukum Islam, dan menerapkan hukum modern dari Barat



diantaranya adalah Turki. Turki menerapkan *Code Civil Switzerland*, tahun 1926 setelah jatuhnya khilafah Usmaniyah. Begitu juga di negara-negara yang terdapat muslim minoritas, seperti di Tanzania yang terdapat muslim minoritas di Zanzibar dan di Kenya. Mereka menerapkan hukum keluarga Barat modern.

*Ketiga*, kelompok Negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Reformasi yang mereka lakukan berupa proses legislasi modern, seperti Cyprus yang melegislasikan dan mengkodifikasi hukum perkawinan dan perceraian Islam tahun 1951. Di lima Negara Asia Selatan dan Tenggara, hukum keluarga Islam juga telah direformasi dengan proses legislasi hukum modern yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki muslim mayoritas; dan Singapura dan Ceylon yang memiliki muslim minoritas. Negara lainnya yang telah mereformasi hukum keluarga yaitu Tunisia, Maroko, Iran, Pakistan, Libanon, Jordania, Algeria, Syiria, Irak, yang telah mereformasi hukum keluarga Islam baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori, dengan mengadopsi system hukum modern. Begitupun dengan Sudan, hanya saja pembaharuan yang dilakukan oleh Negara Sudan adalah hasil ijtihad para Qadhi yang dilakukan pada saat melaksanakan putusan hukuman di pengadilan. Hal inilah menurut Norman Anderson mengistilahkannya dengan *the expedient of reform by judicial decisions* (kebijakan reformasi melalui keputusan hakim).

Berkaitan dengan cara dan metode reformasi Negara-negara muslim pada kelompok ketiga tersebut, terdapat dua metode dan cara dalam mereformulasikan pembaharuan. *Pertama*, *intra-doctrinal reform*, yakni tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara; *takhayyur* (memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama). Metode yang dipakai untuk *takhayyur* dan *talfiq* ini melalui cara menyeleksi berbagai pendapat mazhab secara eklektik melalui fatwa (*judicial directives*) yang mengizinkan pengadilan untuk menyimpang dari aturan mazhab. *Kedua*, dengan cara atau metode *extra-doctrinal reform*, yang pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nash.



Ada beberapa hal yang menarik sebagai bahan diskusi yang terdapat dalam perundang-undangan di Negara-negara muslim modern yang telah melaksanakan reformasi hukum keluarga. *Pertama*, berkaitan dengan penerapan hukum pernikahan beda agama. Masih banyak Negara muslim yang melarangnya, seperti UU Perkawinan dan Perceraian Cyprus tahun 1951, untuk orang-orang Turki, diantara perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang wanita Muslim dengan pria non-Muslim (Pasal 7 (c)). Begitu juga hukum keluarga di Jordania tahun 1951, menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dan perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-muslim (Pasal 29). Dalam hukum Status Personal Irak tahun 1959, Bab 11 tentang larangan Perkawinan Pasal 17, dinyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab adalah sah, tetapi perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan.

*Kedua*, kriminalisasi pernikahan. Kriminalisasi pernikahan merupakan “sesuatu” yang menjadi trend di dunia muslim modern. Hal ini berbeda dengan hukum klasik yang tidak memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum keluarga. Seperti pelanggaran talak atau cerai di muka pengadilan dan pendaftaran perceraian.

Hal ini bisa terlihat di Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Yordania, dan Srilanka yang mencantumkan sanksi hukum dalam pasal-pasal Hukum Keluarga mereka terkait persoalan ini. Di Iran, misalnya, para suami yang melakukan perceraian atau menarik kembali penjatuhan talak/cerai yang dilakukan tanpa registrasi dapat diancam hukuman penjara 1-6 bulan.

Begitupun di Malaysia, penjatuhan talak di luar dan tanpa izin pengadilan dapat dikenakan denda 1000 ringgit; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus. Sedangkan di Mesir, berdasarkan *Law on Personal Status 1929* yang dipertegas lagi dalam amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A, suami yang tidak melakukan pendaftaran perceraian dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 bulan; atau denda 200 pound; atau keduanya sekaligus. Begitu pula petugas pencatatan yang menolak atau tidak melaksanakan tugas pencatatan perceraian dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 1 bulan & denda minimal 50 pound Mesir.



tulisan ini adalah buah dari diskusi dalam mata kuliah Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern.

Meskipun demikian, kami menyadari setiap goresan tinta yang terukir dalam buku ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan kajian-kajian berikutnya. Selamat Membaca!

Bandar Lampung, 04 Februari 2013  
Editor,

Abdul Qodir Zaelani

## DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
HUKUM KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA <i>Mohammad Rusfi</i> .....	1
HUKUM KELUARGA DI SINGAPURA DAN FILIFINA (Studi Analisis Hukum Perkawinan) <i>Nasruddin</i> .....	15
HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM <i>Kumedi Ja'far</i> .....	29
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI SUDAN (Studi Komparatif Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia) <i>Abdul Qodir Zaelani</i> .....	43
PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA ISLAM MODERN (Studi Komperatif Terhadap Kasus Poligami di Negara Tunisia, Malaysia, dan Indonesia) <i>Syamson Fajar</i> .....	65
HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN: PRAKTEK DI NEGARA YORDANIA <i>Ahmad Rajafi</i> .....	95
HUKUM KELUARGA ISLAM MESIR (SUATU ANALISIS GENDER) <i>Dewani Romli</i> .....	105

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI NEGERI MAROKO <i>Sabdo</i> .....	113
DESKRIPSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN <i>Fristia Berdian Tamza</i> .....	129
HUKUM KELUARGA TUNISIA <i>Susiadi A.S</i> .....	137
HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDIA (Studi Tentang Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian) <i>Musnad Rozin</i> .....	149
HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA ARAB SAUDI <i>Maimun</i> .....	183
HUKUM KELUARGA ISLAM DI AFGANISTAN (Menyingkap Pencatatan Perkawinan di Afganistan dan Negara Islam) <i>Khoirul Abror</i> .....	205
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI IRAN DAN PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAID DALAM PERSOALAN POLIGINI <i>Syamsul</i> .....	233



# HUKUM KELUARGA ISLAM DI AFGANISTAN

(Menyingkap Pencatatan Perkawinan di Afganistan dan Negara Islam)

Khoirul Abror

## Pendahuluan

Pada abad 20 an ini, salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.<sup>366</sup> Pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim, secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus ditujukan untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>366</sup> Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 10-11

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, sungguh menyakitkan, terutama pada posisi perempuan dan anak, perkawinan tanpa adanya catatan dari PPN sebagai tugas dari pemerintah, menjadikan sewenang-wenangnya seorang lelaki (suami) yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan perkawinan. Setelah itu melepaskan tanggung jawabnya dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, karena tidak ada bukti otentik yang menjelaskan tentang adanya perkawinan, sehingga menyulitkan sang istri untuk menuntut haknya kepada pengadilan. Dengan makin berkembangnya zaman, menghendaki mayoritas negara yang berpenduduk muslim terbanyak, mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya legetimasi hukum.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam naq, baik al-Qurân maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang didalam al-Qurân diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah pandangan Islam tentang konsep pencatatan perkawinan? Dan bagaimanakah praktek pencatatan perkawinan pada beberapa negara Islam, terutama di Afganistan?

### **Pencatatan Perkawinan dan Prakteknya Pada Masa Awal Islam**

Konsep pencatatan perkawinan pada dasarnya, merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al-Qurân dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.



Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam; *Pertama*, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qurân. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qurân dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (*oral*). *Kedua*, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimah al-`urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, disamping saksi *syar`i* tentang suatu perkawinan.<sup>367</sup> Oleh karenanya, pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *i`lan an-nikâh* (mengumumkan suatu perkawinan ditengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan an-nikâh* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan.<sup>368</sup>

Imam Malik menyatakan bahwa keberadaan saksi bukan merupakan suatu keharusan, melainkan cukup dengan diberitakan atau asal pernikahan tersebut sudah diketahui oleh khalayak di pandang sudah sah. Senada dengan Imam Malik, Abu Taur dan mazhab Syi`ah menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah dengan tanpa saksi, sebab pada hakikatnya pernikahan adalah akad dan akad tidak memerlukan saksi.<sup>369</sup> Pendapat ini diambil setidaknya berdasarkan dua hal. *Pertama*, analogi terhadap jual beli. Allah dalam al-Qurân memerintahkan adanya saksi dalam jual beli, sedangkan saksi tidak

<sup>367</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 121

<sup>368</sup> Aep Saepulloh Darusmanwiati, "Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam", <http://www.indonesianschool.org>, diakses tanggal 22 Januari 2007

<sup>369</sup> M. Najib al-Muti'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhaḍab li al-Syairozi*, (Jeddah: Maktabah al-Irṣad, tt) h. 296. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002) h. 6559



diperintahkan dalam pernikahan.<sup>370</sup> Oleh karena itu, apabila saksi bukan merupakan syarat dalam sah jual beli, maka saksi lebih tidak disyaratkan dalam pernikahan. Kedua, adanya hadis yang memerintahkan untuk memberitakan pernikahan. Hadis tersebut adalah:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Adanya perintah Rasulullah untuk memberitakan pernikahan dianggap merupakan esensi dari perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya saksi bukan merupakan syarat sah nikah, melainkan hanya agar pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat. Apabila tujuan diketahui oleh khalayak tersebut telah terpenuhi, maka saksi tidak lagi diperlukan.<sup>371</sup>

Praktek *iqlan an-nikâh* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya hadis yang menyatakan demikian, diantaranya:

عن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله ص م قال: أعلنوا النكاح  
(أخرجه أحمد)

Artinya: Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan itu". Dalam hadis lain dinyatakan:

<sup>370</sup> Ayat-ayat pernikahan berikut tidak mencantumkan saksi:

فأنكحوا ما طاب لكم من النساء , وأنكحوا الأيامى منكم . .

<sup>371</sup> Lihat keterangan dalam al-Maktabah asy-Syâmilah, *Tuhfaḥ al-Ahwaḍi*, Bab Pernikahan Tanpa Saksi, juz III, h. 131



عن عائشة قالت: قال رسول الله ص م: أعلنوا النكاح و  
اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالصفوف ( أخرجه  
الترمذي)

Artinya: □ Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana". Salah satu bentuk *i□lan an-nikāh* adalah *walimah al □urusy* (resepsi pernikahan). Dalam sebuah hadiś, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakannya, walaupun secara sederhana:

قال رسول الله ص م : أولم ولو بشاة ( رواه البخاري)

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing."

Berpijak dari beberapa hadiś yang telah dikemukakan, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al □urusy* yang merupakan salah satu bentuk *i□lan an-nikāh* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, disamping adanya saksi *syar'i*. Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i□lan an-nikāh*). Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maşlahat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.<sup>372</sup>

<sup>372</sup> M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di*



### **Urgensi Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.<sup>373</sup> Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

- a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak;
- b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak;
- c. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak;
- d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum

---

*Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, h. 135*

<sup>373</sup> Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami'ah* No. 56 Tahun 1994, h. 14-15





telah dilakukan. Olehkarena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.

Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama, selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.<sup>374</sup>

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal asy-syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

### Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim

#### a. Turki

Turki, adalah negara penganut mazhab Hanafi, dan merupakan Negara pertama yang melakukan usaha pembaruan hukum keluarga di dunia muslim, yang dilakukan tahun 1917, dengan lahirnya *Qânûn Qarâr al-Huqûq al-Âilah al-utmaniyyah*, demikian menurut

---

<sup>374</sup> *Ibid*, h. 21



Khoiruddin Nasution;<sup>375</sup> Lebih lanjut dikatakan, dengan mengutip tulisan Tahir Mahmood, undang-undang sivil yang didasarkan pada mazhab Hanafi sudah dipersiapkan tahun 1876 di Turki, yang disebut *Majallat al-Ahkâm al-adliya*, tetapi didalamnya belum ada aturan perkawinan dan kewarisan. Hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian baru dibuat tahun 1915 dan diperbarui tahun 1917. Hasil kodifikasi tahun 1917 inilah yang disebut *Qânûn Qarâr al-Huquq al-Âilah al-utmaniyyah*.<sup>376</sup> Sebagai kelanjutan dari dua dekret raja yang dikeluarkan tahun 1915. Namun sayangnya Undang-Undang Turki baru memuat aturan perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, dan waris.<sup>377</sup> Belum sama sekali menyentuh tentang pencatatan perkawinan.

Tahun 1912 Pemerintah Turki mengadopsi hukum perdata Swiss (*The civil code of Switzerland, 1912*) dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi Turki dan diundangkan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 (*The Turkish civil code of 1926*). Dalam beberapa hal ketentuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 sangat menyimpang dari hukum Islam tradisonal, seperti ketentuan waris dan wasiat yang mengacu pada hukum perdata Swiss tahun 1912.

Materi yang menonjol dalam hukum perdata Turki tahun 1926 adalah ketentuan-ketentuan tentang pertunangan (terutama masalah taklik talak), batas usia minimal untuk kawin, larangan menikah, poligami, pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau isteri yang hendak bercerai diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang dijalani pada waktu tertentu tidak

<sup>375</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia, Tazzaafa, 2009), h. 166.

<sup>376</sup> Lihat. Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: tnp, 1972), h.17.

<sup>377</sup> *Ibid.*





ada perbaikan kondisi rumah tangga, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan cerai di pengadilan.<sup>378</sup>

### b. Afghanistan

Reformasi hukum keluarga, khususnya perkawinan di Afghanistan baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya *Qanûn al-Izwâj* sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum perkawinan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India. Sejalan dengan itu, mengenai hak wanita untuk mengajukan cerai juga diberlakukan secara menyeluruh. Namun, beberapa ketentuan dari hukum ini kemudian diamandemen oleh Keputusan tentang Hak-hak Wanita Tahun 1978.<sup>379</sup>

Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan.<sup>380</sup> Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan

Sebagai contoh: Pakistan dengan *The Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961 menetapkan boleh poligami dengan izin terlebih dahulu dari Pengadilan (*Arbitration Council*). Sementara bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Secara historis, jauh sebelum pemisahan India-Pakistan

---

<sup>378</sup> Nasaruddin Umar, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Makalah, Disampaikan pada acara Seminar Nasional *Hukum Materiil Peradilan Agama, Antara Cita, Realita dan Harapan*, Hotel Red Top, Jakarta, 19 Februari 2010

<sup>379</sup> Atho, Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 139-140

<sup>380</sup> *Ibid*, h. 149



pada tahun 1947, poligami sudah menjadi budaya dan tradisi umum yang banyak dipraktekan oleh umat Islam saat itu. di Pakistan malah diatur dalam Ordonansi tentang hukum keluarga Pakistan tahun 1961. peraturan poligami yang tercantum dalam Pasal 6 menyatakan:

- (1) Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelaki pun yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin tertulis dari Dewan Arbitrase.
- (2) Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan, sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah izin tertulis dari istri atau istrinya telah membolehkan.
- (3) Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta pemohon dan istri atau istri-istrinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan Dewan Arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (4) Dalam memutuskan permohonan tersebut Dewan Arbitrase mencatat alasan terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihkan surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusnya akan berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di Pengadilan.
- (5) Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari Dewan arbitrase; a) akan membayar seluruh mahar dengan segera kepada istri atau istri-istrinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak maka ia akan diperoleh sebagai tunggakan atau sewa, b) dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 Rupee atau kedua-duanya.

Dalam pasal ini poligami dapat dilakukan dengan syarat diperlakukan izin tertulis dari dewan arbitrase (Hakim) sebelum seseorang dapat menikahi istri kedua. Izin tersebut hanya dapat diberikan bila Dewan Arbitrase itu yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang diperlukan dan benar. Dalam hal ini diperlukan





## *Hukum Keluarga* *di Negara-negara Muslim Modern*

adanya persetujuan dari istri terdahulu kecuali kalau dia sakit ingatan, cacat jasmani atau mandul.

Walau bagaimanapun juga izin dewan hakim harus didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Orang yang melanggarnya dapat dihukum penjara paling lama satu tahun atau membayar denda sampai 5000 Rupee atau bahkan keduanya sekaligus. Bila maharnya ditunda, dia tetap harus membayarnya dengan semestinya sedangkan istri yang ada berhak menuntut cerai. Selain semua pembatasan ini, jika telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap batal secara hukum.

Pada hakikatnya, ketentuan yang diperkuat ini merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi praktek poligami beserta implikasi negatif yang ditimbulkannya, terutama ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Pakistan yang nota bene masyarakatnya menganut mazhab Hanafi ternyata secara lebih ketat mengharuskan wali nikah dalam prosesi perkawinan, ini tidak terlepas dari ketentuan siyasah syar'iyah yang ia terapkan.

Undang-Undang poligami di Pakistan merupakan personifikasi diantara enam model penafsiran yang berkembang, yakni *pertama*, menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qurân, *kedua*, memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan. *Ketiga*, harus memperoleh izin lembaga peradilan. *Keempat*, hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami. *Kelima*, benar-benar melarang poligami. Dan *keenam*, memberi sanksi pidana bagi yang melanggar aturan poligami.

Dari beberapa argumentasi di atas, UU Negara tersebut sekali lagi masih mendasarkan secara normatif terhadap teks-teks Al-Qurân walaupun dengan penafsiran sosiologis yang relevan dengan konteks sekarang, kedua mendasarkan pada siyasah syar'iyah berupa adanya



# Hukum Keluarga

## di Negara-negara Muslim Modern

sanksi denda dan pidana bagi mereka yang melanggar atau persyaratan administratif izin poligami dengan persetujuan istri sebelumnya dan anutan mazhab masyarakat yang terus diikuti sebagaimana dalam kasus wali nikah.

### c. Malaysia

Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara di Malaysia.<sup>381</sup>

Pola administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia, kemudian diikuti oleh Kesultanan Brunei. Beberapa pasal yang tercantum dalam hukum keluarga Brunei, secara umum memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Malaysia.<sup>382</sup>

Menurut Undang-Undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah Qaḍi Besar, Qaḍi-qaḍi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi *tauliah* (wewenang) oleh Sultan. Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak (Pasal 138).<sup>383</sup>

<sup>381</sup>Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987), h. 201

<sup>382</sup>*Ibid*, h. 199

<sup>383</sup>Atho Mudzhar, dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, h. 185





Sejalan dengan dua negara tetangganya, Singapura juga memberlakukan aturan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan perkawinan juga tidak berpengaruh pada sah atau batalnya suatu perkawinan karena ketentuan ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam.<sup>384</sup>

#### **d. Indonesia**

Tarik menarik diantara dua hukum yang berbeda atau dualisme hukum dalam masalah perkawinan telah menjadikan masalah tersendiri dalam hukum nasional Indonesia. Nikah siri atau talak tanpa Pengadilan Agama dianggap sah secara agama Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah. Dualisme hukum di Indonesia yang aturannya saling bertentangan terkait pernikahan atau talak merupakan hal yang bermasalah. Salahsatu penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia ada dua kelompok 'mazhab' yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif. Supaya terjadi sinkronisasi maka dipakailah keduanya, sebab bagi negara seperti Indonesia yang berdasarkan hukum yang mana hukumnya dibuat berdasarkan persetujuan rakyat, tentulah sebagai warga yang baik kita harus mengikutinya.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Disamping itu, juga ada konsekuensi hukum dibalik penetapan peraturan ini. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

---

<sup>384</sup> *Ibid*, lihat juga Tahir Mahmood, *Personal Law...*, h. 201-202



undang-undang perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>385</sup>

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. *Pertama*, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. *Kedua*, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat

---

<sup>385</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114





dibatalkan.<sup>386</sup> Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun realita yang terjadi ditengah masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktek nikah *sirri*. Pada dasarnya, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Bab IX Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

---

<sup>386</sup> A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h. 64-65



Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Sebenarnya, apabila ditelaah, kondisi ini terkait erat dengan perbedaan pendapat tentang eksistensi pencatatan perkawinan. Sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan. Alasannya bahwa ketentuan ini tidak diatur dalam nash dan fiqh. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Argumen mereka didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi.

dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini juga didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik.<sup>387</sup>

Dalam kasus nikah *sirri* tersebut, tentunya akan sangat menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan, karena kedudukannya sebagai istri serta hak-hak yang berkaitan dengan kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan. Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang permintaan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut (tidak dicatatkan/ tidak punya akte nikah) dinyatakan sah, dan selanjutnya diperintahkan kepada PPN/ KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Namun, berdasarkan Pasal 7 KHI tersebut, solusi yang ditawarkan melalui permohonan *isbat* nikah ini hanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila:

---

<sup>387</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 131-133





1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>388</sup>

Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para isteri merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada para wanita. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai isteri dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dipertegas oleh Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

### **Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan**

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masalah ini merupakan salah satu hal yang paling banyak diatur dalam Hukum Keluarga negara-negara Muslim. Minimal tercatat ada 5 Hukum Keluarga yang mencantumkan ketentuan tentang masalah ini, yakni Indonesia, Iran, Yaman (Selatan), Yordania, dan Srilanka.<sup>389</sup>

Di Indonesia, sanksi hukuman dapat dijatuhkan terhadap petugas (pencatatan) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan. Dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-. Sedangkan di Iran sanksi hukum diberlakukan

<sup>388</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 115

<sup>389</sup> Nasaruddin Umar, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, makalah Disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, antara Cita, Realita dan Harapan, Hotel Red Top Jakarta, 19 Februari 2010



dalam kasus perkawinan yang dilakukan tanpa registrasi. Pihak bersangkutan (pria yang menikah) diancam hukuman penjara 1-6 bulan.

Yaman (Selatan) memberlakukan hukuman denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun; atau keduanya sekaligus terhadap semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974. Sementara di Yordania, mempelai (yang melangsungkan pernikahan), pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tak terdaftar (tanpa registrasi pihak berwenang) dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan ketentuan *Jordanian Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar.

Menarik untuk dicatat bahwa Srilanka, meskipun penduduk Muslimnya bukanlah mayoritas, malah cenderung lebih banyak memasukan aturan kriminalisasi dalam Hukum Keluarga Muslim yang diberlakukan disana. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perkawinan dan perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maks. 3 tahun.
- b. Melanggar ketentuan Pasal 81:
  - Mempelai pria; petugas pencatatan yang lalai atau enggan mencatatkan pernikahannya; atau lalai/enggan melaksanakan tugas pencatatan suatu pernikahan;
  - Siapa saja yang mendukung atau membantu seorang laki-laki Muslim untuk memperoleh atau mempengaruhi atau mendaftarkan suatu perceraian di luar (tidak sesuai dengan) ketentuan dalam UU ini atau bersekongkol melanggar melalui cara lain;
  - Qaḍi, petugas pencatatan, dan pihak yang turut andil (berpartisipasi) melanggar berbagai aturan dalam Ps. 56 ayat (1) tentang larangan bagi qadi atau petugas pencatatan mengizinkan orang lain untuk menempati posisi mereka dan menjaga semua buku, dokumen, berkas terkait; atau Ps. 56 (4) tentang larangan, kecuali qadi atau petugas pencatatan,





menyimpan buku, daftar, atau catatan yang dimaksudkan sebagai daftar suatu perkawinan atau 9 perceraian orang Muslim, atau rekaman berita acara mengenai perceraian yang diakibatkan atau mengaku diakibatkan oleh pihak lain.

Mereka di atas akan dijatuhi hukuman untuk pertama kali adalah denda maksimal 100 rupee, sedangkan hukuman untuk yang kedua/selanjutnya maksimal 100 rupee atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus (denda dan penjara).

- c. Petugas pencatatan yang sengaja melakukan pencatatan, dan pihak lain yang mendukung atau membantu pencatatan suatu perkawinan yang bertentangan dengan aturan Pasal 22 (kawin pada masa iddah), 23 (Perkawinan di bawah umur), atau 24 ayat (4) (berpoligami melalui izin Hakim) dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus.
- d. Setiap pihak, bukan seorang qadī (hakim), yang mengeluarkan atau menyatakan untuk mengeluarkan izin atau daftar/catatan sebuah perceraian berdasarkan UU ini, atau pihak yang bukan petugas pencatatan, melakukan pencatatan atau menyatakan akan mencatat suatu perkawinan berdasarkan UU ini dapat dijatuhi denda 100 rupee; atau hukuman penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus
- e. Setiap pihak yang sengaja atau mengetahui membuat keterangan palsu;
- f. Dalam suatu pernyataan yang ditandatanganinya berdasarkan Ps. 18 ayat (1) (tentang pengisian dan penandatangan formulir registrasi perkawinan oleh pasangan pengantin dan wali pihak perempuan) dapat dikenakan denda maks. 100 rupee; atau penjara maks. 6 bulan; atau keduanya sekaligus.
- g. Setiap petugas pencatatan:
  - 1) Lalai atau menolak tanpa sebab/alasan yang sah melakukan pencatatan perkawinan;
  - 2) Kecuali dalam kasus yang terdapat pada Pasal 11, melakukan pencatatan suatu perkawinan yang diadakan di luar wilayah tugasnya;



- 3) Melakukan pencatatan suatu perkawinan yang melanggar kondisi-kondisi atau batasan yang terdapat pada surat tugasnya;
- 4) Mencatat suatu perkawinan yang tidak dihadapinya;
- 5) Sengaja menolak untuk melaksanakan atau yang terkait dengan pencatatan suatu Perkawinan; suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Pasal 18, 19, atau ps. 58;
- 6) Sengaja melanggar / menentang berbagai aturan dalam UU ini dapat dikenakan hukuman denda maksimal 100 rupee.

### **Pemikiran Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia.**

Undang-undang RI tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

Mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari Pasal 2 Ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata hukum agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnyanya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat tersebut juga perlu dicatat oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.



Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah sirri.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya satu anak tersebut sama dengan anak



## *Hukum Keluarga*

*di Negara-negara Muslim Modern*

yang lahir dari perkawinan diluar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian, ketika seseorang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam [KHI] Pasal 7).

Namun, Isbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat segera mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.

Tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang. Bila telah memiliki Akte Nikah, maka harus segera mengurus Akte Kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akte kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, anda terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak-anak dalam akte kelahirannya bukan lagi anak di luar kawin.





## **Pencatatan Perkawinan dalam Ajaran Islam**

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan *syari'at* Islam (*maqāṣidus syari'ah*) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan *muḍarat* kepada istri, anak, dan harta bersama (*gono gini*), maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dapat dipandang sebagai masalah *ḍarurat* karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadīś. Hukum yang diterapkan berdasarkan *ijtihād* ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadīś, atau *maqāṣidus syari'ah* berdasarkan *qaidah fihiyah*:<sup>390</sup>

### **تغير الاحكام بتغير الاحوال والازمنة**

Artinya: "Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman".<sup>391</sup> Menurut Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menjadi alat atau factor pengubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.<sup>392</sup>

## **Penutup**

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

<sup>390</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.

<sup>391</sup> Menurut Syamsul Anwar, dalam kesempatan memberi kuliah Program S3 Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, hari Sabtu 03 Nopember 2012 mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat hukum dapat berubah: 1) Bila ada tuntutan untuk berubah; 2) Tidak menyangkut ibadah mahḍah (ibadah pokok); 3) Hukum itu tidak bersifat Qaṭ'i tapi bersifat ḥukmī; 4) ada landasan syar'inya.

<sup>392</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), h. 57.

# *Hukum Keluarga*

## *di Negara-negara Muslim Modern*

1. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia. Tujuannya adalah agar tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia Islam menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang dilegalkan dalam suatu perundang-undangan.
2. Walaupun menimbulkan perbedaan pandangan mengenai eksistensi pencatatan perkawinan, namun, berdasarkan realita yang ada, berbagai negara muslim hanya memberlakukannya sebagai persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan. Dalam hal ini validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum Islam.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Anhari, Masyhur, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum*.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RIM Books, 2007.
- Arto, A. Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Dâr al-Fikr, 2002.
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh, "Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam", <http://www.indonesianschool.org>, diakses tanggal 22 Januari 2007
- Djubaidah, Neng, *Pencatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi: t.n.p, 1972.
- , *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

# Hukum Keluarga

di Negara-negara Muslim Modern

- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- , *Islam and Islamic Law, a Socio-Historical Approach*, Jakarta: Depag RI, 2003
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Muchtar, Kamal, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami'ah* No. 56 Tahun 1994.
- Mudzhar, Atho, dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Muttaqien, Dadan (ed.), *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Najib, M. al-Muti'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhaḍab li al-Syairozi*, Jeddah: Maktabah al-Irṣād, tt.
- Ritonga, Iskandar, *Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Volume 1
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia, Tazzafa, 2009.
- , *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas.



Tebba, Sudirman, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993

Umar, Nasaruddin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Makalah, Disampaikan pada acara Seminar Nasional *Hukum Materiil Peradilan Agama, Antara Cita, Realita dan Harapan*, Hotel Red Top, Jakarta, 19 Februari 2010.

Internet:

[online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/.../488](http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/.../488)Bagikan (Dian Mustika) Jenis File: PDF/Adobe Acrobat -oleh D Mustika - 2011

[http://ebookbrowse.com/makalah-Nasaruddin\\_dirjen-bimas-Islam-hukum-keluarga kontemporer-di-negara-muslim-pdf-d35800502](http://ebookbrowse.com/makalah-Nasaruddin-dirjen-bimas-Islam-hukum-keluarga-kontemporer-di-negara-muslim-pdf-d35800502)

[openlibrary.org/.../Hukum\\_keluarga\\_di\\_dunia\\_Islam\\_arab\\_...](http://openlibrary.org/.../Hukum_keluarga_di_dunia_Islam_arab_...)1 Apr 2008

[kuliahhukumkeluargaIslam12.blogspot.com/.../kedudukan-...](http://kuliahhukumkeluargaIslam12.blogspot.com/.../kedudukan-...)Bagikan15 Mar 2012





Berbicara hukum keluarga terutama di dunia muslim modern, akan selalu menarik untuk diperbincangkan sebagai bahan kajian, referensi dan pertimbangan dalam rangka mewujudkan hukum yang lebih progressif dan komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar serta selalu berkembang di masyarakat seiring perkembangan zaman. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mempunyai kekuatan moral masyarakat.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika potensi menerapkan hukum keluarga yang adaptable dan applicable terhadap budaya dan adat sebuah negara adalah sebuah keniscayaan.

Hal ini terlihat seperti persoalan yang masih menjadi perbincangan yang menarik yakni kriminalisasi pernikahan. Kriminalisasi pernikahan merupakan "sesuatu" yang menjadi trend di dunia muslim modern. Hal ini berbeda dengan hukum klasik yang tidak memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum keluarga. Seperti pelanggaran talak atau cerai di muka pengadilan dan pendaftaran perceraian. Selain itu, masalah poligami menjadi perbincangan yang seru. Sebab persoalan poligami ini bersentuhan langsung dengan budaya dan politik hukum di sebuah Negara. Ada Negara yang yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit), adapula negara yang memperlakukan poligami secara lebih longgar, atau bahkan ada Negara yang sama sekali melarang praktik poligami. Ini baru sekelumit isi dalam buku ini. Sebenarnya masih banyak lagi hal yang bisa didiskusikan dalam buku ini.

Buku ini sangat penting bagi siapa saja yang tertarik untuk mengkaji hukum Islam terutama berkaitan dengan hukum keluarga muslim di Negara-negara muslim modern. Selamat membaca!



Diterbitkan oleh:  
Anugrah Utama Raharja  
(AURA) Printing & Publishing  
JL. Soemantri Brojonegoro  
Komplek Unila Bandarlampung  
HP: 0812 81430268  
www.aura-publishing.com

ISBN : 978-602-9326-56-7

